

BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Politik dinasti pada hakikatnya merupakan salah satu strategi politik berbasiskan pertalian darah atau perkawinan berfungsi untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dari waktu ke waktu. Praktik ini ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari keluarga pertahana untuk terlibat dalam kancah politik. Biasanya, praktik seperti ini dominan terjadi menjelang kontestasi politik. Tujuan utama gerakan ini ialah untuk memperoleh suara terbanyak guna memenangkan kontestasi politik. Dengan demikian mempermudah para elit dinasti menguasai pelbagai sektor kehidupan bangsa. Di sini, para elit politik dinasti dilihat sebagai orang yang memiliki sumber daya ekonomi yang tinggi yang dengan mudah memobilisasi hak suara rakyat dengan jaminan ekonomi dan sosial. Praktik seperti ini sudah dan sedang menguasai sistem pemerintahan dan menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia.

Fenomena politik dinasti di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga jaringan pokok. *Pertama* jaringan identitas. Ada dua kekuatan identitas yang mendominasi di Indonesia yaitu identitas berbasiskeagamaan dan identitas berbasis budaya atau suku. Politik identitas yang berbasis keagamaan sangat mendominasi kehidupan politik di Indonesia khususnya pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu). Jaringan ini merupakan model yang sangat efisien bagi para elit dinasti untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan. Cara kerja politik dinasti di sini ialah membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama seperti kyai, pendeta, biksu, dan imam. Hal ini dilakukan bertujuan mempermudah para elit dinasti mengumpulkan suara rakyat sebanyak-banyaknya malalui dukungan tokoh-tokoh agama yang notabene memiliki pengaruh yang kuat. Di samping itu, pengaruh identitas berbasis budaya jugasangat mendominasi kehidupan masyarakat. Cara kerja politik dinasti melalui jaringan ini yaitu, melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat yang memiliki pengaruh yang besar di dalam budaya. Dengan demikian mempermudah elit politik dinasti untuk memperoleh suara rakyat.

Kedua, jaringan patron-klien. jaringan patron-klien merupakan salah satu dari ketiga jaringan yang mempunyai pengaruh yang cukup luas. Biasanya, jaringan ini hanya digunakan pada saat menjelang pemilu. Sistem kerja jaringan ini ialah membangun sebuah kontrak kerja yang tidak seimbang antara patron dengan klien, di mana para elit politik dinasti (patron) memberikan jaminan ekonomi maupun sosial kepada masyarakat (klien) dengan itu, individu atau kelompok masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu elit politik (patron). Relasi patron dan klien tampak dalam proses pemilu. Dalam proses pemilu, klien biasanya membantu patron berupa pemberian suara dan melakukan kampanye.

Ketiga, jaringan birokrasi. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa birokrasi merupakan salah satu organisasi yang berisi orang-orang seperti para pejabat, PNS (guru, camat, kapala dan bidang, dan kepala dinas) yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat menegakkan aturan seturut kewenangan yang dlimpahkan padanya. Dalam mewujudkan misinya melayani kepentingan masyarakat sikap yang harus dimiliki ialah sikap responsif terhadap terhadap kepentingan masyarakat. Sikap ini perlu, karena birokrasi peran pelayanannya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Namun, dalam jaringan birokrasi, elit politik dinasti seringkali memobilisasi hak suara (PNS) dan menjadikan mereka sebagai broker politik yang bertugas untuk mengumpulkan suara rakyat sebanyak-banyaknya menjelang pemilu.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, politik dinasti menyebabkan kemunduran demokrasi. Kemunduran ini terjadi karena politik dinasti mengeliminasi *demos* dari ruang partisipasi politik. Pada hakikatnya *demos*/masyarakat dalam negara demokrasi seperti Indonesia memiliki hak dan kebebasan yang mutlak untuk ikut berpartisipasi di dalam proses politik. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai otoritas untuk memilih dan dipilih di dalam proses politik. Di samping menutup ruang partisipasi masyarakat, akibat lain yang ditimbulkan politik dinasti ialah, *Pertama*, politik dinasti melahirkan pemerintahan yang korup. *Kedua*, politik dinasti berpotensi untuk melanggengkan hubungan patro-klien. *ketiga*, melahirkan oligarki di dalam tubuh pemerintahan. *Keempat*, meningkat praktik politik uang. *Kelima*, melemahkan daya saing pemilu. *Keenam*, hak asasi manusia dikebiri.

1.2.Saran

Sebagai negara demokrasi, masyarakat mempunyai peran sentral untuk meningkatkan kualitas, arah perkembangan dan kemajuan demokrasi. Di sini, masyarakat dilihat sebagai kunci kesuksesan jalannya sistem demokrasi. Artinya, perkembangan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan semua masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks demokrasi Indonesia, rakyat memiliki hak politik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak ini menandakan bahwa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sebuah negara yang demokratis. Salah satu tindakan praktis masyarakat ialah menghidupkan nilai-nilai demokrasi di dalam setiap pribadi manusia dan setiap lembaga pemerintahan. Dengan demikian, beberapa saran yang rasional dapat disampaikan sebagai berikut.

1.2.1. Masyarakat

Masyarakat perlu mendapat pengetahuan tentang dunia politik dan pendidikan demokrasi yang memadai. Masyarakat perlu membangun dan menumbuhkan budaya kritik terhadap semua kewenangan pemerintah dan setiap tindakan politik pemerintah yang menyimpang dari nilai demokrasi Indonesia. Pada hakikatnya, kritik sebagai proses komunikasi yang perlu bagi dinamika berbangsa dan bernegara. Kritik tidak lahir secara tiba-tiba, selalu ada persoalan yang mendahuluinya, yang butuh direvisi dan didiskusikan untuk menjadi lebih baik. Di samping itu, masyarakat perlu menanam nilai-nilai demokrasi di dalam diri dan sadar akan keberadaannya sebagai bagian dari negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan negara yang harmonis.

1.2.2. Pemerintah

Pemerintah sebagai figur sentral negara. Pemerintah merupakan wakil rakyat yang bertugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Dalam hal menjalankan roda pemerintahan pemerintah tidak terlepas dari campur tangan masyarakat guna untuk menciptakan negara demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ada beberapa sikap dasar pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, pemerintah harus memiliki semangat keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud ialah pemerintah terbuka untuk setiap kritikan dan saran masyarakat terhadap semua kebijakan dan praktik politik yang dibuat. *Kedua*, pemerintah harus memiliki semangat untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau individu. *Ketiga*, pemerintah perlu menanamkan sikap jujur, bersih dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam martabat politik yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV Jakarta: Gramedia, 2008.

Soenes, Chaterine dkk. ed. *Oxford Dictionary Thesaurus and Word Power Guide*. New York: Oxford University Press, 2001.

II. BUKU

As'ad. *Politik Identitas dan Gerakan Sosial Islam (Studi Atas Front Pembela Islam)*. Tangerang: Transwacana, 2016.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2013.

Ariff, Saiful dkk. *Demokrasi: Sejarah, Praktek dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang, 2006.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cipto, Bambang. *Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti: Dari Balik Suara Ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*. Jakarta: Pt Rata Grafindo Persada, 1999.

Dahl, Robert. A. *Perihal Demokrasi. Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Terj A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Obor, 2001.

Fathutin, Abu Tharim, dan Nur Habibi Ihya, *Patronase, Klientelisme dan Politik Identitas dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput, (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB)*. Jakarta: PUSLITPEN, 2020.

- Fai, Bung. *Dinasti dan Patronase di Indramayu*. Guapedia: Oktober 2020.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Hardiman, Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas (Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama, Sampai Postsekularisme)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Ismatulah, Deddy dan Sahid Gatara, Asep A. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Kleden, Paul Budi. *Catatan Tentang Pemilu Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke- 21*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- . *Patisipasi Politik (Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Madung, Otto Gusti. *Politik: Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Ed. Diane Ravitch dan Abigail Thernstrom. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Mantompo, Osgar S., Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing, 2008.
- Mayo, Hendry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- Muthtadi, Burhanuddin. *Perang Bintang: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*. Jakarta: PT Mian Publika, 2014.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi. Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Rusnaedy, Zaldi. *Politik Dinasti di Aras Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Singh, Bilverr dkk. *Demokrasi Tak Boleh Henti*. ed. A. Makmur Makka. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Soltau, Roger. H. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, 1961.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Ed. Ibnu Santoso. Yogyakarta: Uny Press, 2015.
- Syauket, Armalia. *Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup (Fenomena Pilkada Serentak 2020)*. Jakarta: Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka, 2021.
- Triono. “Strategi Pencegahan Politik Uang Berbasis Kearifan Lokal”, dalam Moh. Nizar. dan Wais Alqarni, ed. *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press, 2021.
- Wance, Marno. “Dinasti Politik Pada Aras Lokal di Maluku Utara”, dalam Moh. Nizar dan Wais Alqarni, ed. *Book Series: Demokrasi dan Otonomi Daerah, Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press, 2021.

III. ARTIKEL

Feinberg, Joel. "Hak-Hak Asasi Manusia", dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

Rais, Amin. "Kata Pengantar", dalam Lp3es, ed. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: Lp3es, 1986.

Tjokrowinoto, Moeljarto. "Politisasi Birokrasi", dalam Saiful Arif, ed. *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar, 2004.

IV. JURNAL

Agustino, Leo. "Dinasti Politik Pasca-Orde Baru: Pengalaman Banten". *Jurnal Prisma* 29:3. Juli 2010 <<https://www.academia.edu/11559890/>>

Daven, Matias. "Agama Dan Politik dalam Islam", *Jurnal Ledalero*, 12:2, Desember 2013.

Gunanto, Bjoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia". *Jurnal Administrasi Negara* 8:2 (2020). 24 Desember 2020 <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2024474>>

Handoyo, "Politik Dinasti dan Krisis Lingkungan: Praktik Kekuasaan di Provinsi Banten, Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15:2, 4 Juli 2018.

Hidayat, Arief dan Tundjung. "Politik Dinasti dalam Perspektif Ekonomi dari Kerajaan Demak". *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1:2, (2018). <<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/2847>>

- Hidayati, Nur. “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Orbith*, 10:1, Maret 2014.
- Irawan, Benny Bambang. “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”. *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*, 5:1, Oktober 2007.
- Jelahut, Ferdinandus. “Oligarki dan Paradoks Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal AKADEMIKA*, 14:1, Agustus-Desember 2018.
- Kleden, Frano. “Hoaks, Radikalisme, dan Demokrasi”. *Jurnal Ledalero*, 62:2, Februari 2017.
- Koho, Intan Rachmina. “Oligarki dalam Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Lensa*, 4:50 (2021). 21 Maret 2021 <<https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6>>
- Lestari, Wijoko. “Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa”, *Jurnal Sosiopolitico*, 4:1, Februari 2022.
- Nabila, Nisa., Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. “Pengaruh *Money Politik* dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Notaris*, 13:1.
- Nasrudin, Juhana. “Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)”. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 1:1, 2018.
- Purnamawati, Evi. “Perjalanan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, 18:2, Mei 2020.
- Siregar, Muhammad Taher., M. Arif Nasution, dan Marlon Sihombing. “Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Desa Mengalodang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”. *Jurnal Perpektif*, 10.2, (2021). 08 Juli 2021 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5155>
- Sukri, Mhd. Al Fahjri. “Dinasti Politik di Banten: Familisme Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu*

Politik 10:2 (2020). Desember 2022.
<hlm.171.https://www.researchgate.net/publication/348213804>

Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Jurnal Of Government and Civil Society*, 1:2, September 2017.

Widyawati, "Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis". *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2:2, Oktober 2021.

Wardhana, Allan Fathan Gani. "Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam". *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, 4:2, Desember 2020.

V. SKRIPSI

Berek, Remigius Asuk. "Demokrasi dan Gereja Katolik: Meneropong Demokrasi dan Perspektif Gereja Katolik dan Kontribusinya dalam Mendorong Praktik Demokrasi di Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015.

Emanuel, Yeremias. "Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia (Tinjauan Kritis Atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung)". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2007.

Harto, Saverinus. "Memahami Demokrasi Menurut Muhammad Hatta dan Aplikasinya Untuk Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2015.

Rakarasiwi, Rangga Isra. "Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2021.

Rufaidah, Nurfantin Salma. "Pengaruh Politik Dinasti dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Dengan Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Pemoderasi". Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Siga, Frederikus. "Reformasi Birokrasi: Sebuah Keharusan Menuju Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2014.

Suri, Grignon De Monfotr Boli Pati. "Dampak Korupsi Terhadap Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Melalui Penguatan Demokrasi". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

Yanuaris, Valentinus. "Politik Patronase Sebagai Tantangan Demokrasi Indonesia dan Peran Cendekiawan dalam Menciptakan Gerakan Alternatif". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

VI. INTERNET

Fadhillah, Dini Nur, Febriansyah Ramadhan, dan Teguh Triesna Dewa. “Riset Nagara Institute: Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” (Jakarta: Nagara Institute, 2020), diakses pada 12 oktober 2020 <<https://www.slideshare.net/RepublikaDigital/riset-dinasti-politik-nagara-institute>>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Materi Pengantar Soal Sejarah Indonesia*. (Jakarta) <<adoc.pub/kementerian-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia62da4c506b5210f60f1a488012b496b81982.html>>.

Maldini “Politik Dinasti di Indonesia dalam Perspektif Kekuasaan” (Bahan Kuliah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2020/2021), <https://www.academia.edu/44860005/politik_dinasti_di_indonesia_dalam_perspektif_kekuasaan>.

Stiawan, Arib. et al., “Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah” https://www.academia.edu/41530647/Politik_Dinasti_dalam_Pemilihan_Umum_Kepala_Daerah, diakses pada 2016.